

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gambaran proses yang berkelanjutan dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk juga sistem perekonomian dalam meningkatkan pendapatan nasional disebut dengan pembangunan ekonomi. Dalam hal melihat terjadinya peningkatan pendapatan nasional maka bisa diperoleh dengan mengetahui adanya di suatu wilayah dalam negara yang menghasilkan banyaknya kenaikan output total. Output total yang meningkat didasarkan dari banyaknya sumber daya alam yang bervariasi. Kayanya sumber daya alam dimanfaatkan oleh sumber daya manusia. Kemudian diseimbangkan dengan kuantitas angkatan kerja serta kegiatan sarana dan prasarana produksi yang mendukung. Dalam rangka meningkatkan produksi produk dan jasa yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi, maka perlu menjaga keseimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi produksi. (Yuliathinerda, 2019)

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan unsur penting dan paling berpengaruh dalam mengatur dan mengendalikan sistem perekonomian, seperti produksi, distribusi, konsumsi dan investasi. Keterlibatan mereka dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan penghasilan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia adalah tenaga kerja, input pembangunan, dan juga konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja yaitu umur 15-64 tahun. Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan

tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja, misalnya adalah masalah pensiun.

Masalah ketenagakerjaan dapat menjadi suatu kendala dalam pembangunan ekonomi disuatu negara. Di Indonesia salah satunya sebagai negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2016-2020 rata-rata mencapai 264.545 jiwa, dimana BPS menerangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia sebesar 258.705 jiwa, lalu di tahun 2017 penduduk meningkat menjadi 261.891 jiwa (naik 1,23%), kejadian yang sama di tahun 2018 penduduk meningkat kembali yakni sebesar 265.015 jiwa (naik 1,19%), tahun 2019 penduduk terus meningkat hingga tahun 2020, yaitu di tahun 2019 sebesar 266.912 jiwa (naik 0,17%) dan di tahun 2020 sebesar 270.204 jiwa (naik 1,23%). Angkatan kerja menjadi bagian diantaranya. Angkatan kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan tiap tahunnya, dari data BPS jumlah angkatan kerja tahun 2016 menunjukkan sebesar 125.443.748.00 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 128.062.746.00 jiwa (naik sebesar 2,08 %), peningkatan kembali terjadi lagi ditahun 2018 yakni sebesar 133.355.571.00 jiwa (naik sebesar 4,13%), begitu juga di tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 135.859.695.00 jiwa (naik sebesar 1,87%), hingga tahun 2020 juga meningkat menjadi 138.221.938.00 jiwa (naik sebesar 1,73%).

Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja didalam pasar bertambah. Namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 sebesar 7.031.775.00 jiwa, lalu meningkat di tahun 2017 sebesar 7.040.323.00 jiwa (naik 0,12%), kemudian di tahun 2018 meningkat lagi yakni sebesar 7.073.385.00 jiwa (naik 0,46%), kemudian angka pengangguran terus meningkat ditahun 2019 hingga 2020, yaitu tahun 2019 sebesar

7.104.424.00 jiwa (naik 0,43%) dan pengangguran tertinggi terjadi ditahun 2020 yaitu sebesar 9.767.754.00 jiwa (naik 37,48%). Hal ini didukung oleh (Pangastuti, 2017) yang mengatakan bahwa apabila penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari pada permintaan tenaga kerja, maka dapat menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang begitu kompleks karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya yang saling berinteraksi. Pengangguran yang terus menerus akan menimbulkan keresahan sosial dan dapat menyebabkan kemiskinan. Karena tingkat pengangguran merupakan indikator tingkat kemakmuran setelah pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu pesatnya laju pertumbuhan angkatan kerja mesti diseimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Maka pemerintah negara mesti menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja yang tinggi tersebut. (Ilham, 2016)

Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia juga hampir sama terjadi di Provinsi Jambi, meskipun dengan proporsi yang berbeda. Berikut adalah data kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023.

Tabel 1.1 Data Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (persen)

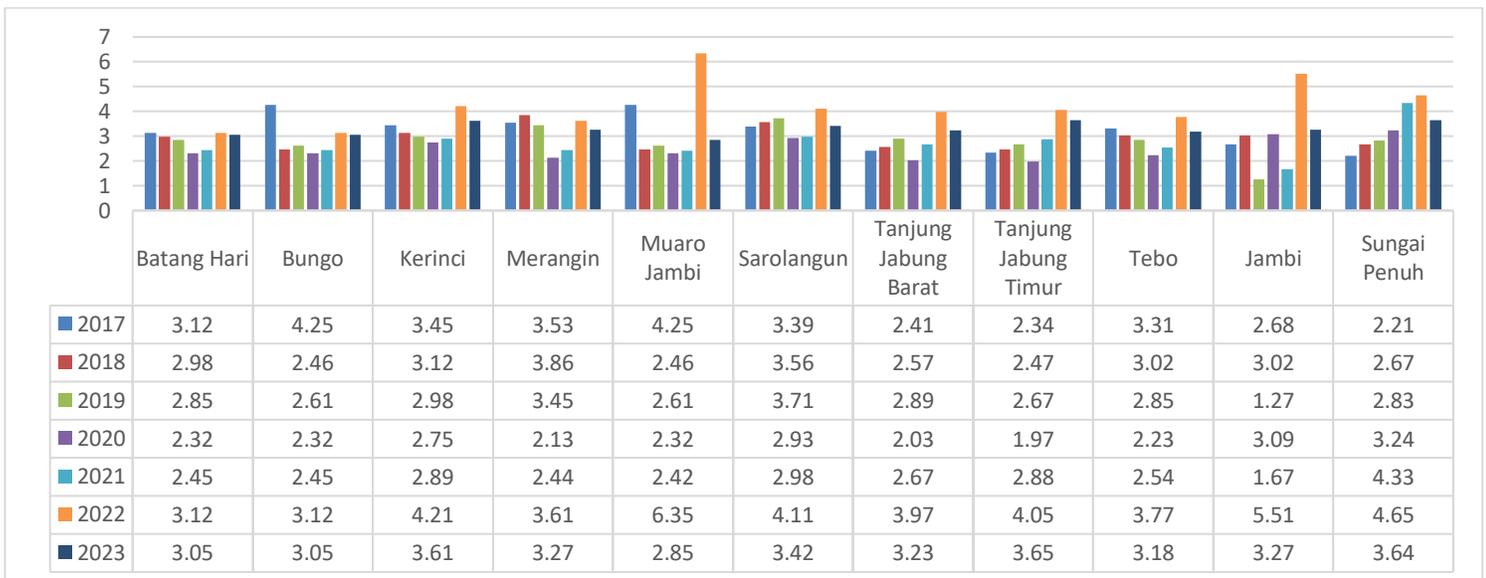
Kabupaten/Kota	tahun							Rata - rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Batang Hari	96,43	96,13	95,44	95,58	95,74	96,47	96,15	95,99
Bungo	95,11	96,97	96,18	94,06	94,14	94,50	94,77	95,10
Kerinci	96,74	97,26	97,38	97,57	97,68	97,37	97,52	97,36
Merangin	95,90	96,53	96,32	95,14	95,17	95,31	95,65	95,72
Muaro Jambi	94,61	95,48	94,80	94,57	94,41	94,65	94,60	94,73
Sarolangun	97,75	95,94	95,91	94,29	94,48	94,78	94,91	95,44
Tanjung Jabung Barat	96,93	97,62	97,43	97,84	97,47	97,12	97,05	97,35
Tanjung Jabung Timur	97,64	98,20	98,37	98,59	98,44	98,68	98,33	98,32
Tebo	95,11	96,97	97,10	97,05	97,17	98,62	98,29	97,19
Jambi	94,45	93,59	93,47	89,51	89,34	91,05	91,73	91,88
Sungai Penuh	95,86	94,87	96,00	94,44	97,00	97,51	96,20	95,98

Sumber : (Tabel statistik BPS Provinsi Jambi, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan keadaan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dari tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi jambi terus mengalami ketidakstabilan dari tahun ke-tahun, bahkan dari tahun 2017 sampai 2021, Kota Jambi terus mengalami

penurunan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5,11 persen dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 91,88 persen menjadikan kota jambi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja paling rendah di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi Kabupaten dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jambi dengan rata-rata sebesar 98,32 persen.

Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah. Penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya (Sumarsono, 2009).

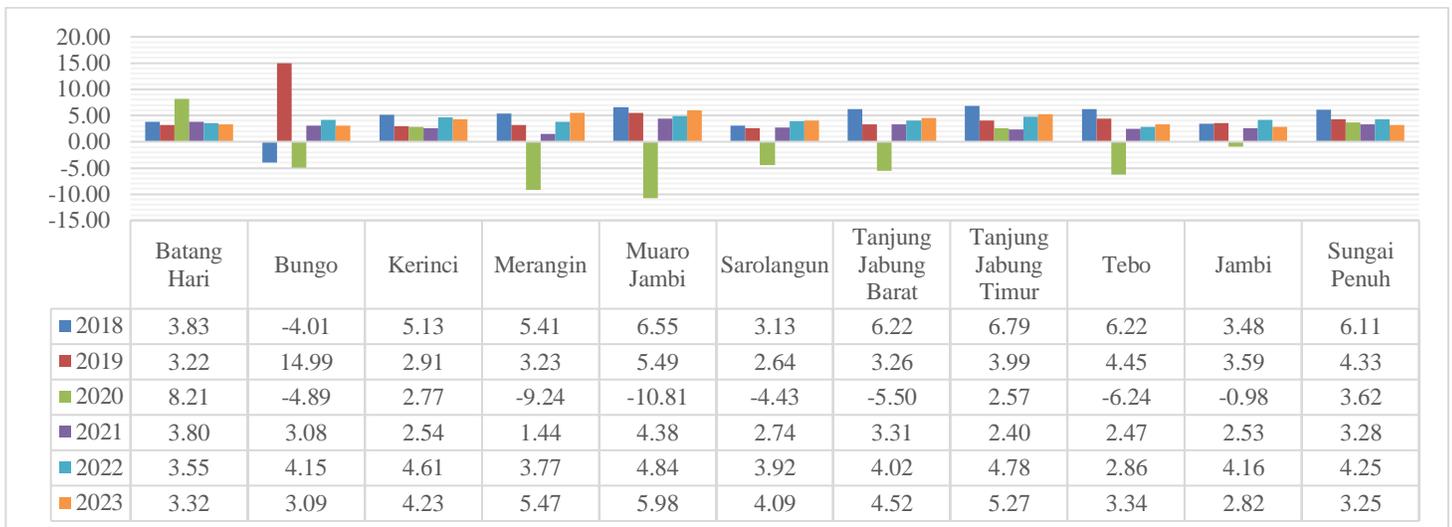


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Gambar 1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jambi masih fluktuatif. Hal itu ditandai dengan naik turunnya tingkat inflasi pada 7 tahun terakhir. Pada tahun 2017, Kabupaten Muaro Jambi memiliki tingkat inflasi tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain di angka 4,25 persen, namun terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi 2,46 persen, dan mengalami kenaikan yang tajam di tahun 2020 menjadi 6,35 persen. Hal yang sama terjadi pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi di tahun 2022, terjadi peningkatan inflasi yang tinggi dari tahun sebelumnya, dan turun di tahun berikutnya.

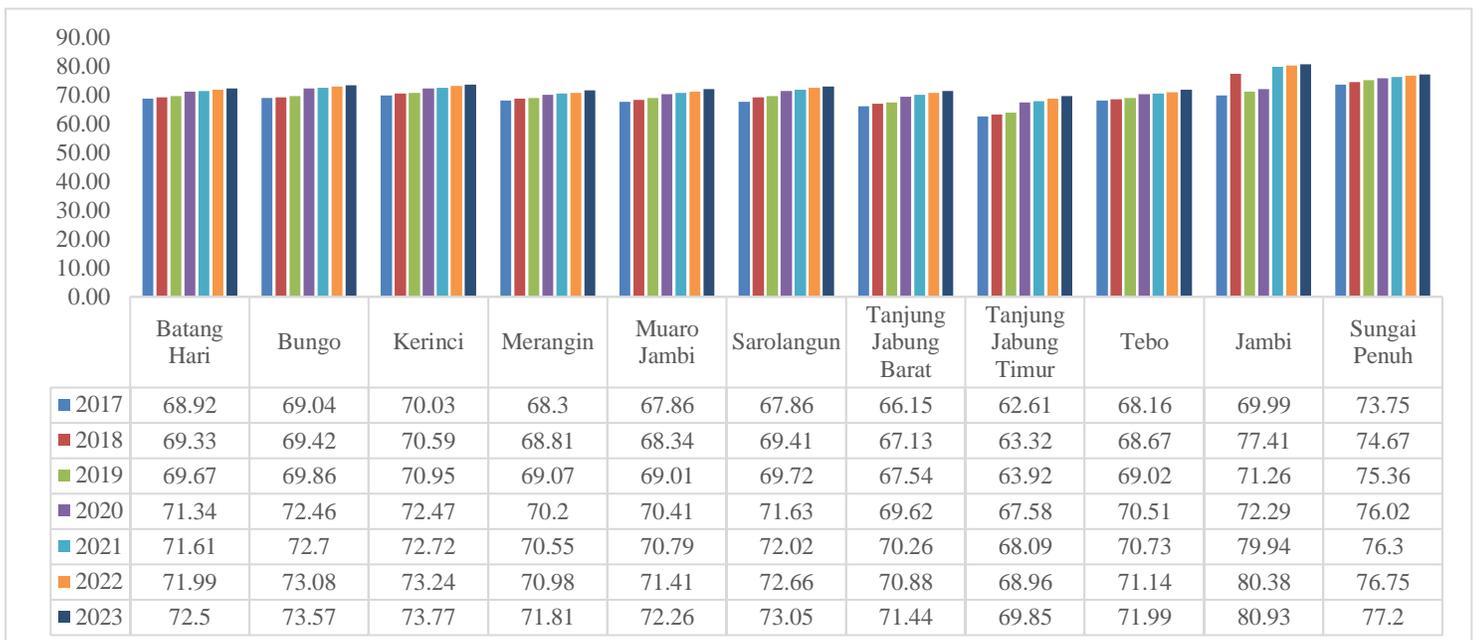
Menurut (Nanga, 2005), Inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya, tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi dirasa cukup tinggi maka akan mengakibatkan tingkat harga yang tinggi dan menyebabkan tingkat konsumsi menjadi rendah, hal ini akan mengakibatkan produsen menurunkan tingkat produksinya, dan mengakibatkan berkurangnya permintaan akan tenaga kerja, hal ini akan berakibat terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Gambar 2 Tingkat Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat di Provinsi Jambi Tahun 2017–2023

Berdasarkan gambar 2 tersebut menunjukkan keadaan pertumbuhan konsumsi masyarakat di Provinsi Jambi dari tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami ketidakstabilan dari tahun ke-tahun. Hal ini dapat dilihat dari Kabupaten Bungo, di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,01 persen, namun ditahun berikutnya mengalami peningkatan yang sangat tajam menjadi 14,99 persen, dan ditahun berikutnya kembali turun menjadi 4,89. Pada tahun 2020 tepatnya setelah terjadi pandemic covid-19, hamper seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan konsumsi masyarakat yang cukup signifikan. Penurunan yang terjadi pada masing – masing Kabupaten/Kota memiliki perbedaan yang cukup ekstrem pada tahun 2020, salah satu Kabupaten/Kota dengan penurunan konsumsi masyarakat yang cukup ekstrem adalah Kabupaten Muaro Jambi yang mengalami penurunan hingga 10,81 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Gambar 3 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Tahun 2017–2023

Berdasarkan gambar 3, Dari tahun 2017-2023 IPM masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka IPM tertinggi di Provinsi Jambi di akhir periode terdapat di Kota Jambi yaitu sebesar 80,93, dan dibawahnya ada Kota Sungai Penuh dengan angka IPM sebesar 77,2. Angka IPM terendah di Provinsi Jambi tahun 2023 terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 69,85, dan di atasnya ada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan angka IPM sebesar 71,44.

Ketika IPM disuatu wilayah tersebut tinggi, itu menunjukkan kualitas hidup masyarakatnya juga tinggi. Semakin berkualitasnya seseorang maka kesempatan mendapatkan pekerjaan juga akan semakin tinggi, karena bagi perusahaan sumber daya manusia itu merupakan aset penting, sebab sumber daya manusia yang akan menentukan organisasi atau perusahaan itu apakah maju atau tidaknya, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan memajukan perusahaan. Sehingga ketika perusahaan semakin maju maka meningkatkan output dan menguntungkan perusahaan lalu menciptakan cabang baru bagi perusahaan yang nantinya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. (Hafiz dkk., 2021)

Menurut penelitian terdahulu oleh Siti (2021) melakukan penelitian terkait Analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian yang dilakukan Siti tersebut variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH KONSUMSI MASYARAKAT, INFLASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi penyerapan tenaga kerja, konsumsi masyarakat, inflasi, indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh konsumsi masyarakat kabupaten/kota, inflasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi penyerapan tenaga kerja, konsumsi masyarakat, inflasi, dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi tahun 2017-2023
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh konsumsi masyarakat , inflasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi tahun 2017-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Harapan dari peneliti agar hendaknya hasil penelitian yang dilakukan bisa berguna juga bermanfaat kepada pembaca sebagai sarana untuk mengetahui sumber informasi dalam menambah, memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bidang sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian dalam penelitian ini agar bisa untuk dijadikan sebagai sarana bagi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja di Sumatera. Serta harapannya buat peneliti-peneliti berikutnya bisa dijadikan acuan di dalam penelitian mereka.